



WALIKOTA KUPANG

PERATURAN WALIKOTA KUPANG  
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TENTANG  
PROSES KENAIKAN GAJI BERKALA PNS BERBASIS ELEKTRONIK  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa demi peningkatan kinerja pelayanan administrasi Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Kupang, maka perlu terus dilakukan penataan sistem dan prosedur;
- b. bahwa salah satu aspek penting dalam perbaikan mutu pelayanan administrasi pemerintahan adalah adanya Standar Operasional Prosedur (SOP);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur tentang Proses Kenaikan Gaji Berkala PNS Berbasis Elektronik (E-KGB) pada Sekretariat Daerah Kota Kupang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

sh

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TENTANG PROSES KENAIKAN GAJI BERKALA PNS BERBASIS ELEKTRONIK PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA KUPANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Setda adalah Sekretariat Daerah Kota Kupang.
2. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dilakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan tentang bagaimana dan kapan harus dilakukan dan oleh siapa pekerjaan itu dilakukan.

sh

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan ini adalah :

- a. sebagai standar cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
- b. mengurangi tingkat kelalaian dan kesalahan yang mungkin dilakukan oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individu pegawai dan organisasi secara keseluruhan;
- d. meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
- e. memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya;
- f. membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedur dalam memberikan pelayanan administrasi pemerintahan;
- g. menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat baik dari sisi waktu maupun prosedur; dan
- h. menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas.

### TUJUAN

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkan SOP Proses Kenaikan Gaji Berkala PNS Berbasis Elektronik adalah sebagai acuan/reverensi dalam melakukan Pelayanan Kenaikan Gaji Berkala berbasis elektronik kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Setda Kota Kupang.

### AZAS

#### Pasal 4

SOP disusun dengan azas efektif, efisien, transparan, akuntabel, dinamis, mudah dipahami dan dapat dilaksanakan.

## BAB III SUBYEK DAN OBJEK

### Pasal 5

- (1) Subyek yang dilayani adalah orang pribadi.
- (2) Obyek pelayanan adalah proses kenaikan gaji berkala PNS berbasis elektronik di lingkup Setda Kota Kupang.

sh



BAB IV  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 6

SOP Proses Kenaikan Gaji Berkala PNS Berbasis Elektronik(E-KGB) pada Sekretariat Daerah Kota Kupang adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 10 Juli 2018

WALIKOTA KUPANG,

  
JEFIRSTSON R. RIWU KORE

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 10 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

BERNADUS BENU

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2018 NOMOR 337

sh

**PROSEDUR PROSES KENAIKAN GAJI BERKALA PNS BERBASIS ELEKTRONIK  
DI LINGKUP SETDA KOTA KUPANG**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Kelengkapan	Mutu Baku	Output
		Admin	User	Verifikator	Kabag	Asisten Administrasi Umum			
1	Menginput Data Master yang terdiri dari Data Unit Kerja, Pangkat/ Golongan Ruang, data pegawai, data regulasi/ lampiran regulasi menjadi Data Base KGB PNS						1. Foto 2. data pegawai 3. Regulasi	10 Menit	Database
2	Menginput data pegawai ( SK. Pangkat/ Berkala/ Mutasi/ Pensiun)						SK, Pangkat, Berkala, Mutasi dan pensiun	5 menit	Proses Berkala
3	Memproses kenaikan gaji berkala dan mengedit jika ada koreksi dari Verifikator						Hasil inputan proses berkala	5 menit	Proses KGB/
4	Melakukan Validasi/ Verifikasi						Proses KGB	5 menit	Data ter validasi
6	Mencetak KGB						Proses KGB	5 Menit	KGB Pdf
7	Proses Penandatanganan						Surat KGB	10 Menit	KGB
8	Mengirimkan ke BKD, BKPPD dan PNS yang bersangkutan.						Surat KGB	15 Menit	Tanda Terima

*Handwritten signature/initials*